

Efektifitas Pelatihan *Strategic Planning* Metode Kombinasi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Kepuasan Peserta di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Irwandy^{1*}, Adelia U. Ady Mangilep, Rini Anggraeni, Farhah Husain Ghanus, Nur Latifah Salman

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin¹
irwandy.fkmuh@gmail.com^{1*}

Abstrak

Kabupaten Pinrang adalah daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024 begitupun dengan rencana strategis periode lima tahunan milik Dinas Kesehatan. Namun akibat adanya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 maka Kabupaten Pinrang belum dapat membuat dokumen tersebut akibat belum terpilihnya kepala Daerah definitif. Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sambil menunggu terpilihnya Kepala Daerah maka Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan untuk menyusun rencana strategis periode 2025-2026. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sebuah kegiatan dengan metode yang tepat untuk membantu Dinas Kesehatan, agar dapat memahami dan membuat dokumen rencana strategis dengan cepat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dengan metode kombinasi (penyampaian materi, studi kasus, dan simulasi penyusunan) dan menilai efektifitasnya untuk meningkatkan pemahaman dan kepuasan peserta. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh 30 peserta. Hasil analisis kuantitatif *Pre-Test* menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebesar 10 – 20% paham dan sangat paham terkait materi yang diberikan, kemudian terjadi peningkatan pada hasil *Post-Test*, dimana pemahaman peserta menjadi 60 – 70% paham dan sangat paham. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai.

Kata Kunci: Dinas Kesehatan; Metode Kombinasi; Pengabdian kepada Masyarakat; RPJMD; Rencana Strategis.

Abstract

Pinrang Regency is an area with a Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) period which will end in 2024 as well as a five-year strategic plan belonging to the Health Service. However, due to simultaneous national regional head elections in 2024, Pinrang Regency has not been able to produce this document due to the fact that a definitive regional head has not yet been elected. To fill the gaps in planning documents while waiting for the Regional Representatives to be elected, the Ministry of Home Affairs instructed them to prepare a strategic plan for the 2025-2026 period. Based on this, an activity with the right method is needed to help the Health Service be able to understand and create strategic plan documents quickly. This community service aims to provide training to the Pinrang District Health Service using a combination method (delivery of material, case studies, and preparation simulations) and assess its effectiveness to increase participants' understanding and satisfaction. The training was held for 2 days and was attended by 30 participants. The results of the *Pre-Test* quantitative analysis showed that the participants' level of understanding was 10 - 20% understanding and very understanding regarding the material provided, then there was an increase in the *Post-Test* results, where participants' understanding was 60 - 70% understanding and very understanding. This shows that the activity objectives have been achieved.

Keywords: Health Service; Community Service; Combinaton Method; RPJMD; Strategic Plan.

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak tertinggi setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan menjadikan pembangunan kesehatan sebagai suatu hal yang penting dilakukan (Asri, R. H., & Nur A. S., 2022). Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Individu yang sehat dapat menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan SDM kesehatan, peningkatan pembinaan pada program-program kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan yang menunjang keberlangsungan program kerja dan agenda kerja berbasis kesehatan (Nopiani, N., 2019).

Pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan baik jika perencanaan yang dilakukan bersifat terarah dan terpadu. Perencanaan yang terarah dan terpadu dimaksudkan dengan adanya kesinambungan antara perencanaan periode lalu dengan periode yang akan datang. Perencanaan yang baik tentu berefleksi dari evaluasi program-program sebelumnya. Sehingga perencanaan yang akan datang dapat dibuat lebih terukur dan sesuai. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang melakukan perencanaan jangka panjang selama 5 tahun atau yang disebut Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikatakan bahwa Rencana Strategis yang disusun pada setiap tingkat pemerintahan pusat maupun daerah diperlukan untuk menentukan strategi atau arah dalam menyusun rencana pembangunan dalam lima tahun. Renstra juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya modal dan manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang akan berakhir pada tahun 2024 dan sambil menunggu terpilihnya kepala daerah definitif maka Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan untuk dibuat Renstra Periode 2025-2026 dengan aturan-aturan yang berbeda dengan Renstra pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan Pelatihan penyusunan *Strategic Planning* Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Secara umum kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam menyusun rencana strategis yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peserta mengenai konsep penyusunan rencana strategis dinas kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja dinas kesehatan. Perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta akan diukur dengan melakukan *pre-post test*;
2. Pelatihan ini dirancang sebagai pelatihan *training of trainer* (TOT) dimana diharapkan nantinya salah satu output dari pelatihan ini adalah tersedianya tenaga terampil yang nantinya akan dapat menjadi pemateri untuk pelatihan bagi seluruh tenaga kesehatan untuk wilayah pinrang;
3. Tersedianya Modul Penyusunan rencana strategis dinas kesehatan yang dapat digunakan sebagai modul standar oleh dinas kesehatan kabupaten lain Sulawesi Selatan selaku mitra

kegiatan untuk kedepannya secara mandiri melakukan kegiatan pelatihan pelayanan kepada seluruh stafnya.

2. Latar Belakang

Perangkat Daerah dalam hal ini dinas kesehatan merupakan bentuk desentralisasi yang dilakukan oleh Indonesia, dimana dinas kesehatan diberikan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat. Dinas Kesehatan dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi dinas kesehatan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi, disamping fungsi lainnya yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Perencanaan dinilai sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan setiap fungsi manajemen lainnya. Hal ini mengingat bahwa perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan semua aktivitas organisasi (Mawarni E.A., & Wuryani E., 2020). Oleh karena itu perencanaan memiliki peran yang penting bagi dinas kesehatan.

Penilaian terkait baik atau buruknya suatu perencanaan sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan tersebut dapat direalisasikan. Suatu perencanaan dapat dikatakan baik dan berkualitas jika rencana yang telah disusun tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik walaupun secara teknis dan akademis tidak ada hal yang terlalu istimewa dari rencana tersebut. Sedangkan suatu perencanaan dikatakan kurang baik bahkan buruk, jika rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik, meskipun secara teknis dan akademis rencana tersebut sangat menonjol (Deradjat M. S., 2022).

Bentuk perencanaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan adalah penyusunan *strategic planning* atau Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra memberikan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan (Setyowati W., & Nugroho E., 2019).

Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis akan membuat visi dan misi yang dimiliki dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Strategis (Renstra) pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis di antaranya adalah:

1. Sebagai *roadmap* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.

3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

3. Metode

Metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang adalah dengan pelatihan *strategic planning*. Pelatihan ini akan menjadi *Training of Trainer (ToT)*, dimana nantinya peserta yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan dapat menjadi pemateri untuk melatih staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yang lainnya. Pelatihan ini akan dilakukan dengan menerapkan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan simulasi penyusunan rencana strategis. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Adapun rincian tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

3.1 Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan kegiatan terdiri dari studi literatur, analisis masalah, dan survei pendahuluan dengan melakukan kunjungan dan koordinasi awal dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang untuk melakukan kegiatan Pelatihan *Strategic Planning*

3.2 Implementasi Kegiatan

Pada tahap ini kegiatan pelatihan dilakukan dengan memberikan materi terhadap peserta pelatihan. Adapun materi pelatihan yang diberikan mencakup rencana kerja dan rencana strategis dinas kesehatan, sistematika penulisan rencana strategis dinas kesehatan, kinerja dinas kesehatan, teknik perumusan permasalahan dan isu strategis dinas kesehatan, penyusunan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan dinas kesehatan, serta cara menyusun rencana strategis. Pemberian materi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penyampaian materi, studi kasus, dan kerja kelompok. Selama pelatihan dilakukan peserta pelatihan sangat aktif dalam proses diskusi yang berlangsung, yang diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan *Strategic Planning*

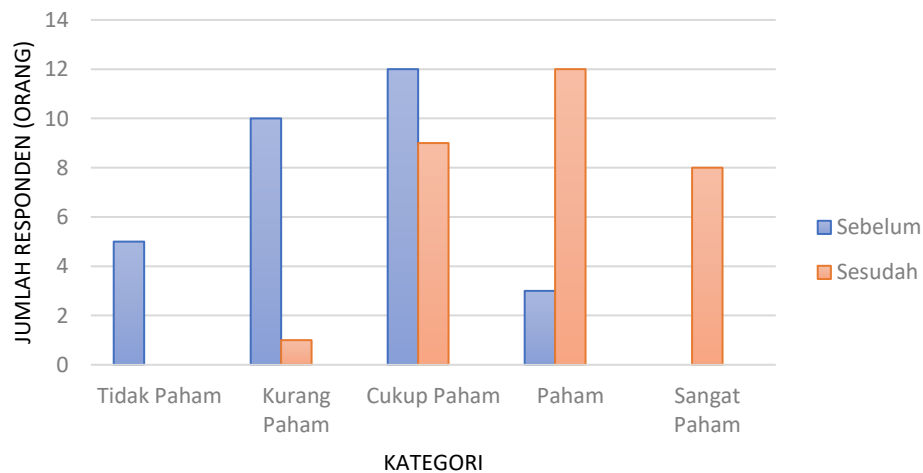
3.3 Pengukuran Capaian Kegiatan

Pengukuran capaian kegiatan dilakukan dengan menggunakan *Pre-Test* dan *Post-Test*. Pelaksanaan *Pre-Test* dilakukan sebelum pelatihan diberikan dan *Post-Test* dilakukan setelah

pelatihan selesai dilakukan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan. *Pre-Test* dan *Post-Test* dipilih sebagai metode dalam mengukur capaian kegiatan karena menjadi salah satu dari tiga alat penilaian yang sangat disarankan untuk digunakan karena merupakan evaluasi langsung yang ringkas dan efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pelatihan (Costa, 2014).

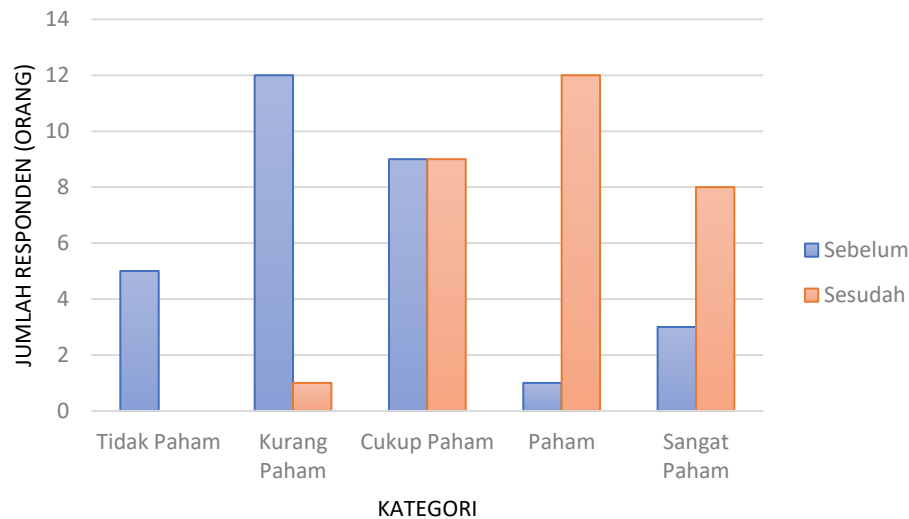
4. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan *Strategic Planning* Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang diikuti oleh 30 orang pegawai Dinas Kesehatan yang merupakan perwakilan masing-masing bidang dan bagian yang ada di Dinas Kesehatan. Untuk mengukur peningkatan pemahaman yang dimiliki oleh peserta pelatihan dilakukan *Pre-test* dan *Post-Test*. Adapun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan *Pre-Test* dan *Post-Test* pada pelatihan diperlihatkan pada Gambar 2 – 9.



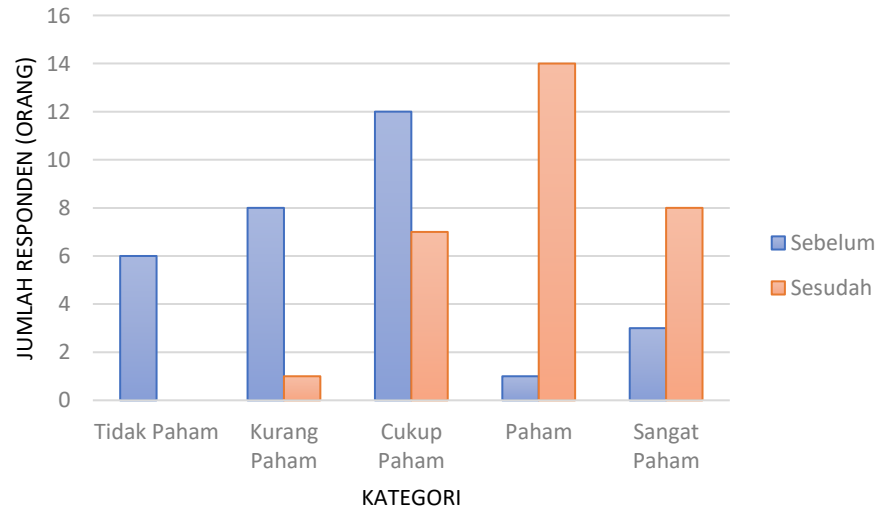
Gambar 2. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Terkait Sistematika Penulisan Restra Dinas Kesehatan

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebelum pelatihan dilakukan sebagian besar peserta pelatihan belum terlalu paham terkait sistematika penulisan Renstra. Hal tersebut dapat diketahui karena sebagian besar peserta memilih kategori cukup paham (40%) dan kurang paham (33%), sedangkan yang memilih kategori paham hanya 10% peserta pelatihan. Setelah pelatihan dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman, dimana sebagian besar peserta memilih kategori paham (40%) dan ada juga yang memilih kategori sangat paham (26%).



Gambar 3. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta terkait Cara Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan

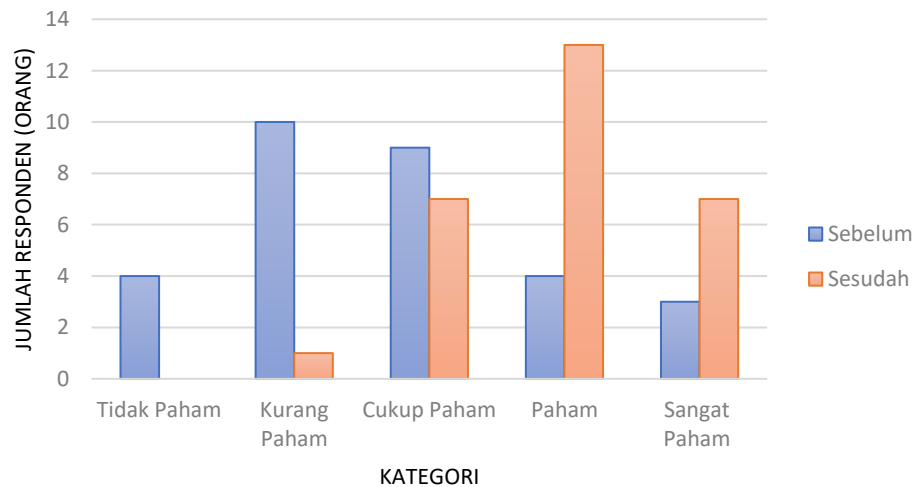
Untuk cara penilaian kinerja dinas kesehatan sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori kurang paham (40%) sebelum pelatihan dilakukan. Namun, setelah pelatihan telah dilaksanakan terjadi peningkatan, dimana sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori paham (40%), bahkan ada yang memilih kategori sangat paham (24%), seperti diperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 4. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta terkait Teknik Perumusan Permasalahan Dinas Kesehatan

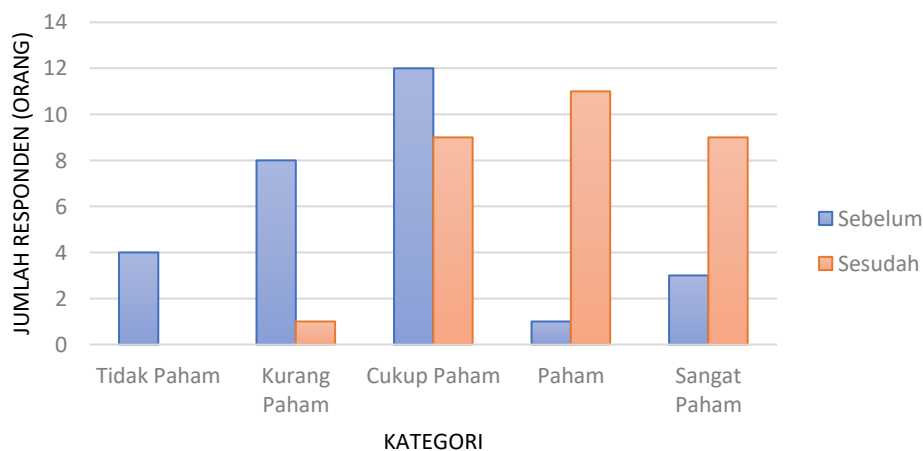
Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa sebelum pelatihan dilakukan sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori cukup paham (40%) untuk pemahaman terkait Teknik Perumusan Permasalahan Dinas Kesehatan, bahkan ada yang memilih kategori tidak paham (20%). Setelah pelatihan dilakukan terdapat peningkatan pemahaman, dimana mayoritas peserta memilih kategori

Paham (46%) dan sangat paham (24%), meskipun masih ada juga peserta yang memilih kategori kurang paham (3%).



Gambar 5. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Terkait Cara Pemilihan Isu Strategis Dinas Kesehatan

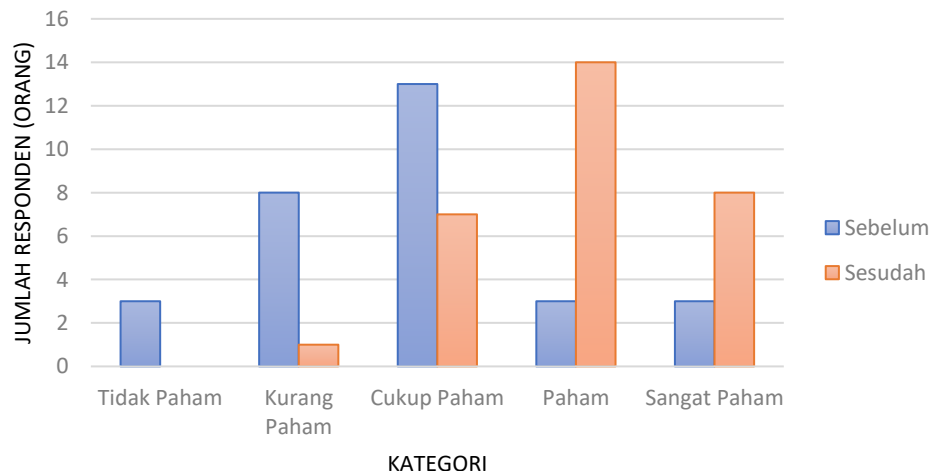
Pemahaman peserta pelatihan terkait cara pemilihan isu strategis dinas kesehatan sebelum pelatihan dilakukan masih kurang, dimana sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori kurang paham (33%) dan cukup paham (30%), bahkan ada yang masih tidak paham sama sekali (13%). Namun, setelah pelatihan dilakukan terdapat peningkatan yang signifikan dimana peserta yang memilih kategori paham meningkat menjadi 43%, seperti diberikan pada Gambar 5.



Gambar 6. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Terkait Cara Penyusunan Visi dan Misi Dinas Kesehatan

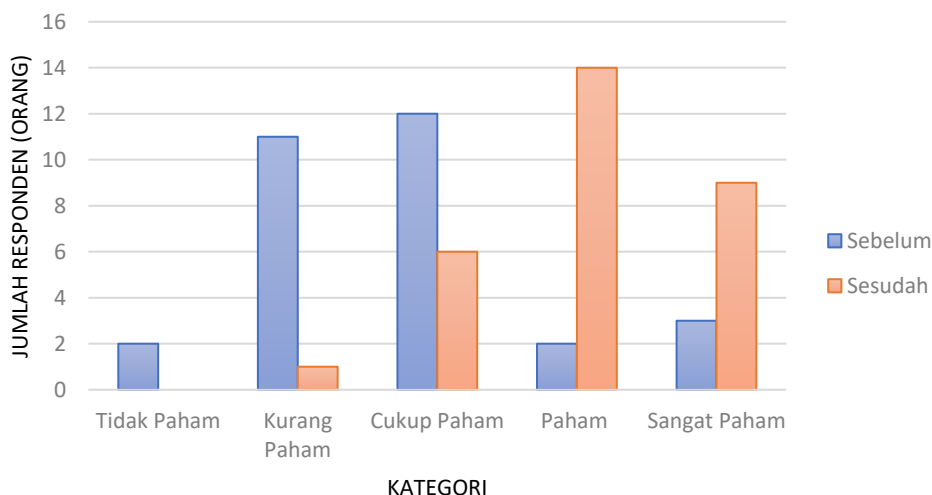
Gambar 6 menunjukkan bahwa sebelum pelatihan dilakukan sebagian besar peserta memilih kategori cukup paham (40%) dan kurang paham (24%) terkait pemahaman tata cara penyusunan

visi dan misi dinas kesehatan, namun ada juga yang memilih kategori sangat paham yaitu sebesar 10%. Setelah pelatihan dilaksanakan, telah terjadi peningkatan pemahaman, dimana tidak ada lagi peserta pelatihan yang memilih kategori tidak paham, meskipun masih ada yang merasa kurang paham (3%).



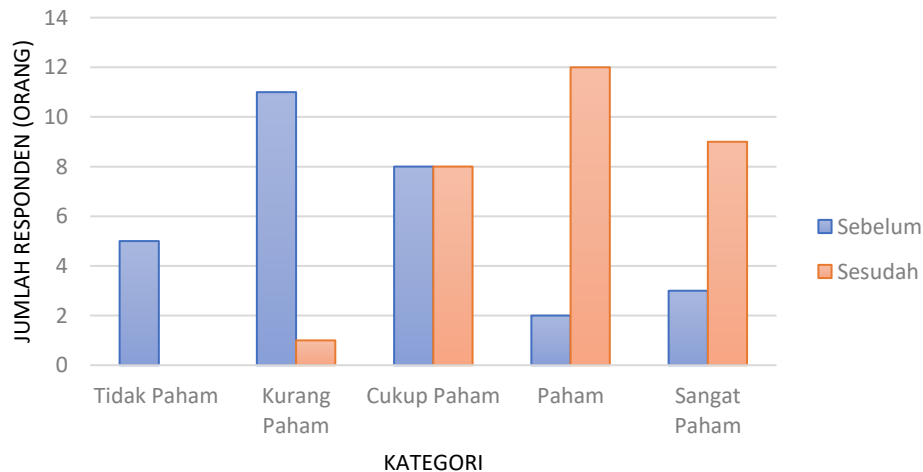
Gambar 7. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta terkait Penyusunan Tujuan dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa sebelum pelatihan dilakukan, pemahaman peserta pelatihan terkait penyusunan tujuan dan arah kebijakan masih kurang, dimana sebagian besar peserta memilih kategori cukup paham (43%), bahkan ada yang memilih kategori tidak paham (10%). Namun, setelah pelatihan dilakukan terjadi perubahan pemahaman, dimana mayoritas peserta memilih kategori paham (46%) dan sangat paham (24%).



Gambar 8. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Terkait Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Pada Gambar 8 dapat diketahui bahwa sebelum pelatihan dilakukan mayoritas peserta pelatihan memilih kategori cukup paham (40%) dan kurang paham (36%) untuk pemahaman yang dimiliki terkait penyusunan program dan kegiatan dinas kesehatan. Setelah pelatihan dilakukan terdapat peningkatan pemahaman, dimana sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori paham (46%) dan sangat paham (20%).



Gambar 9. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Terkait Tata Cara Penyusunan Dokumen Renstra

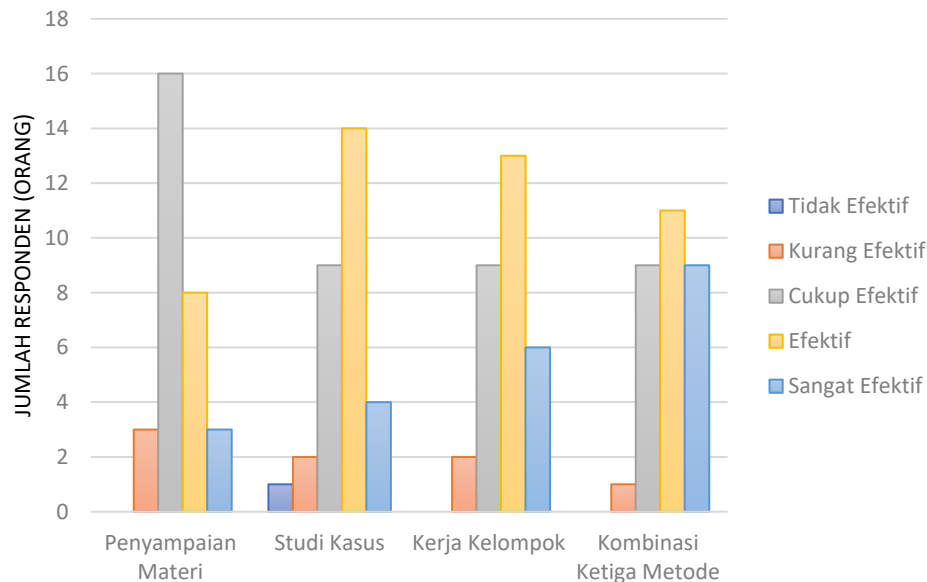
Pemahaman terkait tata cara penyusunan dokumen Renstra sebelum pelatihan masih kurang, dimana mayoritas peserta pelatihan memilih kategori kurang paham (36%), bahkan ada yang masih tidak paham (16%). Sedangkan setelah pelatihan dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman, dimana sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori paham (40%) dan sangat paham (30%), seperti ditunjukkan pada Gambar 9.

Berdasarkan pelatihan *strategic planning* yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman Dinas Kesehatan terkait rencana strategis. Adapun aspek yang mengalami peningkatan pemahaman mencakup tata cara penyusunan dokumen renstra, penyusunan program dan kegiatan, penyusunan tujuan dan arah kebijakan, penyusunan visi dan misi, pemilihan isu strategis, teknik perumusan masalah, tata cara penilaian kinerja serta sistematika penulisan restra dinas kesehatan. Peningkatan pemahaman yang terjadi tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap Dinas Kesehatan mengingat peran dan kedudukan Renstra yang sangat krusial.

Kedudukan dokumen Renstra pada sistem manajemen bisa ditinjau dari beberapa hal, yaitu bagian berasal amanat undang-undang, bagian dari sistem perencanaan nasional, menjadi persyaratan administrasi pada penyelenggaraan pelayanan, ialah panduan serta acuan untuk perencanaan lainnya serta untuk memenuhi tuntutan perubahan perkembangan organisasi (Sabardiman, dkk., 2020)

Dokumen Renstra memiliki peran yang penting bagi dinas kesehatan, dimana Renstra digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk perencanaan lainnya. Selain itu, terdapat tiga alasan lain pentingnya rencana strategis bagi dinas kesehatan yaitu: Pertama, memberikan kerangka dasar dalam penyusunan perencanaan lainnya. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan

mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik awal bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi (Ayuningtyas D., 2018). Mengaju pada hal tersebut, maka sudah seharusnya dinas kesehatan memiliki pemahaman yang baik terkait penyusunan Renstra.

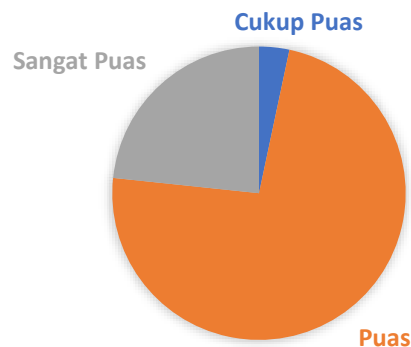


Gambar 10. Perbandingan Efektifitas Metode Pelatihan *Strategic Planning* Dinas Kesehatan

Gambar 10 menunjukkan tingkat efektivitas metode pelatihan yang digunakan pada pelatihan *strategic planning* dinas kesehatan. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa kombinasi ketiga metode (penyampaian materi, studi kasus, dan kerja kelompok) menjadi metode yang dinilai sangat efektif dalam pelatihan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa metode studi kasus merupakan metode yang mencoba mensimulasi kondisi dunia nyata ke dalam lingkungan yang dapat dikontrol, dimana diskusi akan dilakukan untuk memahami proses pengambilan keputusan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Penerapan metode ini memberikan keuntungan karena dapat menelaah lebih jauh dan mendalam kasus yang diberikan sehingga topik yang dibahas dapat dipahami secara saksama (Ibrahim, 2023). Sedangkan metode kerja kelompok atau diskusi kelompok dinilai lebih baik dari pada teknik ceramah atau penyampaian materi. Hal tersebut karena Diskusi kelompok merupakan forum komunikasi antar dua orang atau lebih dengan tujuan mencari suatu penyelesaian dari suatu masalah yang dialami. Diskusi kelompok yang dilakukan akan membangun dinamika interaksi antar anggota, melatih keterampilan komunikasi, meningkatkan cara berpikir, dan membangun kerjasama dan hubungan yang lebih erat (Nove, dkk., 2021).

KEPUASAN TERHADAP PROSES PELATIHAN



Gambar 11. Gambaran Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Proses Pelatihan

Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa sebagian besar peserta pelatihan memilih kategori puas (73%) dan sangat puas (23%) terhadap proses pelatihan yang dilakukan. Hal tersebut berarti metode pelatihan yang digunakan sudah tepat karena peserta pelatihan puas dan tidak memiliki keluhan untuk pelatihan yang dilakukan.

5. Kesimpulan

Pelatihan *strategic planning* telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dianggap penting mengingat kedudukan dan peran renstra yang sangat krusial bagi dinas kesehatan. Pelatihan yang diberikan memberikan dampak positif bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang berupa peningkatan pemahaman pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang terkait renstra. Sebelum pelatihan dilakukan, sebagian besar pegawai dinas kesehatan memiliki pemahaman yang kurang terkait renstra, *Pre-Test* menunjukkan tingkat pemahaman peserta hanya sebesar 10 – 20% paham dan sangat paham terkait materi yang diberikan. Namun setelah pelatihan dilaksanakan, sebagian besar pegawai dinas kesehatan memiliki pemahaman yang baik, atau terjadi peningkatan pada hasil *Post-Test*, dimana pemahaman peserta menjadi 60 – 70% paham dan sangat paham.

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada pemateri dan juga peserta Pelatihan *Strategic Planning* Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, serta kepada LP2M Universitas Hasanuddin sebagai lembaga yang memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Asri, R. H., dan Nur A. S., (2022). Implementasi Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuan Badas Sumbawa. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 2(2), 383-388).
- Ayuningtyas, D., (2018). *Perencanaan Strategis Untuk Organisasi Pelayanan Kesehatan*. PT Grfindo persada. Jakarta.
- Costa. (2014). *Choosing The Right Aessment Method Pre- Test/ Post-Test Evaluation*. Boston University. Amerika Serikat.

- Deradjat M. S., (2022). Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 83-89.
- Ibrahim. (2023). Pengaruh Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Efektifitas Pembelajaran. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(1), 1-10.
- Mawarni, E. A., dan Wuryani, E., (2020). Analisis Kinerja Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(1), <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n1.p%p>
- Nopiani, N., (2019). Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 130-134.
- Nove, A. H., Basuki, A., dan Sunaryo, S. A., (2021). Efektivitas teknik diskusi dalam bimbingan kelompok untuk membantu dalam perencanaan karir siswa. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(4), 366-371.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
- Sabardiman, K., Afrizal, A., dan Nurmaesah, N., (2020). Evaluasi Perubahan Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) terhadap Tata Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 194-212.
- Setyowati, W, dan Nugroho, E., (2019). Penyusunan Rencana Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. *Journal of Information Systems for Public Health*, 4(1), 18-7.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.